

BAB V

KESIMPULAN

Setelah lahirnya era reformasi membuat daerah menjadikan masa tersebut sebagai masa transisi pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi demi memperbaiki bentuk pemerintahan yang demokratis dan efisien. Masa tersebut ditandai dengan lahirnya UU Otonomi Daerah yang membuat daerah di Indonesia melakukan manuver dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu daerah yang menerapkan UU tersebut adalah Kabupaten Padang Pariaman. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya Kota Pariaman tahun 2002, yang semula merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Padang Pariaman. Konsekuensinya adalah ibukota Kabupaten Padang Pariaman yang berada di Kota Pariaman harus dipindahkan ke wilayah kabupaten.

Dalam pemindahan tersebut terjadi peristiwa menarik dalam sejarah politik dan pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman. Fenomena tersebut bermula pada tahun 2005, pada tahun itu merupakan masa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pasangan Muslim Kasim dan Ali Mukhni untuk meraup suara di Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik. Melalui kampanyenya pasangan Muslim Kasim dan Ali Mukhni menjanjikan Sungai Sariaik menjadi ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Sebagian masyarakat menjadi kecewa, Muslim Kasim dan Ali Mukhni yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman tidak menepati janjinya ketika kampanye. Masyarakat yang terdiri dari berbagai aliansi dan LSM meminta DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan Kecamatan VII

Koto Sungai Sariak sebagai ibukota kabupaten sesuai janji yang dilontarkan oleh bupati sehingga menimbulkan konflik terkait penentuan ibukota kabupaten. Konflik yang terjadi yaitu demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Sariak didepan kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan aksi tersebut diteruskan didepan kantor Bupati Padang Pariaman. Suasana demonstrasi semakin tidak terkendali dan mendesak bupati untuk menuntaskan rapat bersama DPRD dengan mengagendakan penetapan Sungai Sarik menjadi ibukota kabupaten, karena menurut para demontran Sungai Sariak selain telah dijanjikan oleh bupati pada masa kampanye juga dinilai sebagai lokasi yang cocok untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan karena letaknya yang strategis jika dilihat dari wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Konflikpun semakin memanas setelah DPRD tidak menghiraukan tuntutan masyarakat untuk menetapkan VII Koto Sungai Sariak sebagai ibukota kabupaten, hal itu dikarenakan bahwa DPRD melihat hasil yang dilakukan oleh tim ahli yang dibentuk oleh pemerintah daerah melalui Bappeda yang terdiri dari unsur akademisi dari berbagai kalangan universitas. DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan Bupati akhirnya dalam sidang paripurna menetapkan Nagari Parik Malintang sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman yang baru. Pertimbangan penetapan tersebut didasari oleh kajian tim ahli dari akademisi dan masukan masyarakat yang melakukan berbagai kajian dan sosialisasi mengenai lokasi penetapan tersebut. Maka pada akhirnya penetapan Nagari Parik Malintang sebagai ibukota kabupaten Padang Pariaman dapat diterima semua pihak.

Dalam pelaksanaan pemindahan ibukota kabupaten terkesan dipaksakan, hal itu dikarenakan adanya kunjungan kerja dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Sumatera Barat. Daerah yang akan dikunjungi oleh presiden adalah Kabupaten Tanah Datar, namun karena kedekatan Muslim Kasim dengan pemerintah pusat, Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan kunjungan dari presiden dengan mengagendakan tiga kegiatan yaitu peletakan batu pertama tugu ikan di Lubuk Akung, peresmian PDAM yang berada di Kayu Tanam dan peletakan batu pertama bangunan kantor Bupati Padang Pariaman yang berada di Nagari Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Sampai saat ini kawasan Parik Malintang setelah menjadi ibukota kabupaten terus mengalami perkembangan, baik dari segi ekonomi, sarana dan prasarana dan hubungan sosial masyarakat setempat.

